

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan penelitian merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang peneliti dapatkan dilapangan serta disesuaikan dengan teori yang digunakan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Manajemen Strategi dari J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen. Teori tersebut memiliki 4 dimensi yakni Pengamatan Lingkungan (Environmental Scanning), Perumusan Strategi (Strategy Formulation), Implementasi Strategi (Strategy Implementation), dan Evaluasi dan Pengendalian (Evaluation and Control). Didalam penelitian ini lebih memfokuskan untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan Implementasi Strategi (Strategy Implementation) oleh BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta. Adapun Pembahasan yang telah peneliti paparkan mengenai pelaksanaan Implementasi Strategi BAZNAS (BAZIS) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta yakni sebagai berikut :

Implementasi strategi merupakan proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur.

Program. Program merupakan pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. Program melibatkan restrukturisasi perusahaan, perubahan budaya internal perusahaan, atau awal dari suatu usaha penelitian baru.

Anggaran. Anggaran yaitu program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya, yang dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan.

Prosedur. Prosedur adalah sistem langkah-langkah atau teknik yang berurutan yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan.

Dasar Hukum mengenai pedoman dan pelaksanaan dana zakat diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang didalamnya sudah dijelaskan bahwa pengelolaan zakat salah satunya bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan sebagai wujud mensejahterakan masyarakat. Dalam PERBAZNAS juga diterangkan 8 (delapan) asnaf yang berhak menerima zakat (Fakir, Miskin, Amil, Riqab, Gharimin, Fi Sabilillah, Ibnu Sabil, dan Muallaf).

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, terkait Implementasi Strategi penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta dianalisis menggunakan teori Implementasi Strategi dari Thomas L. Wheelen dan David J. Hunger, yaitu program, anggaran dan prosedur mendapatkan temuan-temuan, dimana peneliti mengklasifikasikannya kedalam kategori keunggulan dan kelemahannya.

5.1.1 Program

Wujud nyata BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta dalam upaya menanggulangi kemiskinan diantaranya adalah dengan membuat 5 (lima) Pilar Jak B yakni :

1. Jak B Green (bidang lingkungan),
2. Jak B Sehat (bidang kesehatan),
3. Jak B Cerdas (bidang Pendidikan),
4. Jak B Bertaqwa (bidang keagamaan),
5. Jak B Berdaya (bidang ekonomi).

Dari 5 Pilar tersebutlah BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta membuat beberapa Program Unggulan seperti :

- a. Program bantuan biaya pendidikan Masa Depan Jakarta (MDJ),
- b. Program semua bisa makan,
- c. Program bedah rumah,
- d. Program bantuan fisabilillah untuk da'i dan pengajar agama,
- e. Program pondok pesantren difabel,
- f. Program café difabis.
- g. Program bantuan langsung pengobatan, dll.

Adapun program yang terfokuskan untuk penanggulangan kemiskinan lebih banyak di Pilar Jak B Berdaya dengan rincian sebagai berikut :

Gambar 5.1.1 Data Program dan Biaya Jak B Berdaya

No	Penyaluran	Penerima Manfaat	RP
I	JAK B' BERDAYA	675,602	52,671,063,769
	A. Pendayagunaan :	253,827	9,106,744,659
	- Penguatan Ekonomi dan Ketahanan Pangan	5	500,000
	- Zmart	1,890	2,052,000,000
	- Saudagar tangguh	2,755	1,713,266,800
	- Difabis	1,100	95,389,799
	- Ekonomi Umat	20	13,000,000
	- Pelatihan Kewirausahaan	1,456	712,725,700
	- Pendidikan dan Keterampilan Mustahik	-	1,900,000
	- Kafalah Dhuafa Lansia	124,630	2,478,380,021
	- Insentif Pemberi kerja Difabel	6	9,000,000
	- Pendidikan & Pelatihan Disabilitas	5	-
	- Peningkatan Kesejahteraan Dhuafa	121,890	1,960,857,400
	- Pelatihan Kebencanaan	70	69,724,939
	B. Pendistribusian	421,775	43,564,319,110
	- Bantuan untuk meringankan beban hidup	123,480	8,666,744,555
	- Kafalah Yatim	-	3,000,000
	- Santunan Yatim	15,195	2,852,846,029
	- Santunan Dhuafa	15,010	2,990,286,367
	- Santunan Yatim Binaan Pemprov (Pemda)	5,500	550,000,000
	- Santunan Dhuafa Binaan Pemprov (Pemda)	9,065	583,779,900
	- Santunan Petugas Mesjid	12,090	2,276,784,100
	- Santunan Guru Ngaji Rumahan	13,050	2,641,854,444
	- Santunan Guru Honoror Madrasah	11,300	2,180,329,000
	- Santunan Guru TPA/TKA/PAUD	11,625	2,358,010,900
	- Santunan Kematian dan Blaya Penguburan	-	1,006,500
	- Program Santunan Binaan Pemda	21,480	1,902,031,528
	- Zakat Fitrah (Idul Fitri)	10,500	479,008,900
	- Pemberian Sarana dan Alat Bantu Difabel	145	37,458,700
	- Jak Mendengar (ABD)	74	273,494,100
	- Jak Bergerak (Kursi Roda)	574	844,478,500
	- Jak Mendengar (Kaki Palsu)	61	81,057,900
	- Penyaluran Bantuan Kepada Mustahik	50	40,029,000
	- Bantuan Daging Qurban	1,715	8,004,190,000
	- Bantuan Kebencanaan	69,585	3,469,111,920
	- Bantuan Kemanusiaan	16,005	1,386,411,335
	- Sarana Prasarana Kebencanaan	84,750	1,532,468,232
	- Riqab	250	-
	- Bantuan Gharimin	60	158,706,000
	- Ibnu-sabil	211	251,231,200

Sumber : Diolah Peneliti (2023)

Dimana temuan yang dilakukan selama penelitian yaitu seluruh program yang dirancang dan dilaksanakan oleh BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta sejatinya bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, namun kebanyakan program masih terfokuskan kepada program jangka pendek atau

konsumtif tradisional. Distribusi yang bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, tidak ada binaan upaya peningkatan taraf kesejahteraan terhadap mustahik agar dapat berubah menjadi mustahik. Dari data diatas dapat kita lihat masih sedikitnya program berdayaguna jangka panjang untuk para mustahik atau penerima manfaat agar dapat memperbaiki perekonomiannya sehari-hari. BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta juga tidak mempunyai data lengkap penerima bantuan dari tahun ke tahun, sehingga BAZNAS (BAZIS) tidak dapat mengontrol apakah masyarakat tersebut meminta bantuan sekali atau berulang kali, hal tersebut menjadi kelemahan yang sangat signifikan. Untuk menjalankan program besar pendayagunaan membutuhkan anggaran yang besar dan juga sumber daya manusia yang memadai dalam pelaksanaannya, sehingga membuat program pendayagunaan menjadi sedikit, dari hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dana zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS (BAZIS) tidak mencukupi kebutuhan permohonan bantuan yang diajukan oleh masyarakat. Sumber daya manusia yang terbatas untuk memonitoring program dengan dayaguna jangka panjang juga menjadi kelemahan. Namun tidak jarang juga program dari BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta menjadi inisiator kolaborasi kebaikan untuk seluruh masyarakat Jakarta.

5.1.2 Anggaran

Dalam pelaksanaan 5 Pilar Jak B khususnya Jak B Berdaya dimana temuan yang menjadi keunggulan adalah jumlah anggaran yang disiapkan oleh BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta untuk penanggulangan kemiskinan sudah mencapai 60% (enam puluh persen) dana yang dikumpulkan setiap tahunnya, dan 20% (dua puluh persen) untuk beasiswa mahasiswa Masa Depan Jakarta (MDJ) lalu sisanya untuk dana amal sosial kebaikan lainnya. Dengan begitu anggaran tersebut bisa digunakan demi kelancaran dalam menjalankan program-program yang ada. Dalam hal ini memang suatu anggaran sangatlah dibutuhkan untuk menunjang kegiatan agar berjalan dengan baik. Hanya saja BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta sebagai Lembaga zakat tidak dapat meminta anggaran lebih kepada

Pemerintah Provinsi jika ada kebutuhan mendesak, karena anggaran dari Pemerintah Provinsi hanyalah sebatas support atau membantu operasional sehari-hari lembaga. Sehingga dalam hal pendanaan BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta bersifat mandiri dengan mencari muzakki di Provinsi DKI Jakarta. Namun Kesadaran masyarakat khususnya di DKI Jakarta dalam membayar zakat juga masih sangat minim, banyak faktor yang membuat masyarakat tidak mau membayar zakat, mulai dari ketidaktahuan tentang kewajiban zakat, malas hartanya berkurang, bahkan sampai ketidakpercayaan masyarakat kepada Lembaga amil zakat itu sendiri, sehingga membuat pengumpulan dana zakat menjadi sedikit dan zakat yang dikeluarkanpun menjadi minim. Hal ini membuat pengumpulan dana zakat menjadi jauh dari target yang sudah ditetapkan.

Kurangnya branding BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta juga menjadi kekurangan yang dirasakan dalam hal pengumpulan dana zakat, karena banyak nya pesaing lembaga zakat di luar sana dan branding mereka yang baik membuat BAZNAS (BAZIS) sebagai lembaga pengumpul dan penyalur dana zakat yang sah dalam konstitusi menjadi redup pamornya.

5.1.3 Prosedur

Dalam pelaksanaan Program yang ada BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta sudah menjalankan prosedur yang ada, tetapi aktivitas kerja belum berjalan secara optimal dikarenakan belum adanya peraturan lembaga yang disahkan sehingga mempengaruhi prosedur yang sudah ada. Pengawasan terhadap amil dan mustahik juga jarang sekali dilakukan, hal ini terbukti dengan sangat jarang nya melakukan pemantauan terhadap para mustahik yang menerima bantuan. Selanjutnya didalam rangkaian prosedur masih sering terjadinya keterlambatan birokrasi yang membuat pencairan bantuan menjadi lama. Belum menyeluruhnya sistem digital dalam prosedur ini juga menjadi kelemahan yang signifikan dialami oleh BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta.

Dengan demikian BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta sebagai badan pengelola dan pengumpul zakat merupakan badan yang berperan aktif

dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta. Namun belum adanya regulasi khusus dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjadikan BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta sebagai satu wadah dalam hal pengumpulan dan penyaluran dana zakat, sehingga lembaga lain yang mengumpulkan dana zakat harus wajib melapor ke BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta.

Dari penelitian mengenai Implementasi strategi dapat disimpulkan bahwasannya, pihak BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta sudah dapat menjalankan dengan baik perannya sebagai penanggulangan kemiskinan, meskipun program kerja dan strategi yang dilakukan oleh BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta berbasis kepada masyarakat namun kurangnya sosialisasi menjadikan masyarakat kurang mengetahui mengenai segala bentuk informasi yang disampaikan oleh BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta.